



RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022.

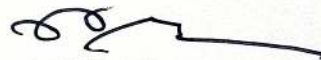
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 selain berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2020).

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini, disamping sebagai dokumen Rencana Kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2022 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2022 guna mendorong pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam program pemberdayaan

Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan – masukan positif dari semua pihak demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahun 2022 ini. Kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerjaini kami ucapkan terima kasih semoga Tuhanyang Maha Esa memberkati dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 29 Juli 2021

Kepala Dinas PMD Kab. Bone



Drs. A. GUNADIL UKRA, MM
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip.196710061993031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
BAB V PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Dinas PMD Tahun 2020.....	8
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Program Rutin dan Teknis Dinas PMD Tahun 2020...	9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	12
Tabel 2.4 Jumlah Kepala Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kab. Bone Tahun 2020.....	19
Tabel 2.5 Jumlah Perangkat Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kab. Bone Tahun 2020.....	20
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kab. Bone	21
Tabel 2.7 Telaah Visi dan Misi Bupati Terpilih.....	23
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata caraperencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagaimana yang termuat pada pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai urusan wajib di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Pemerintah Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMD diawali dengan Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 -2023, hasil evaluasi hasil Renja DPMD tahun 2020, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2020, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta

prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja serta memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja DPMD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra, yang dilanjutkan dengan Tahapan Penyusunan Rancangan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berubah Nomenklatur menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat , dalam hal ini kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bone sebagai instansi yang mengurus bidang Pemerdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dituangkan dalam prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud untuk tahun 2022 melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan RencanaKerjaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2022dimaksudkan :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaiankinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidangdi lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.

Tujuan penyusunan Rencana KerjaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2022adalah:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.;
2. Sebagai panduan dalam pencapaian target perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan secara lebih terarah dan berkesinambungan
3. Menunjang terwujudnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan tahunan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keterkaitan antara Renja DPMD dengan dokumen RKPD, Renstra DPMD 2018 - 2023,

Dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja maupun IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi yang ada dimasyarakat dan usulan yang disampaikan pada saat pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan dan musrenbang kabupaten.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antarlain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUSI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bias dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone pada tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaankinerja DPMD Kabupaten Bone ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), Anggaran DPMD tahun 2020 sebesar Rp. 6.070.536.202,- terealisasi sebesar Rp. 5.952.592.878,- atau pencapaian 98,06%.

Tabel. 2.1

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

No.	Belanja	Anggaran	Realisasi	% Fisik	% Keu
1.	Belanja Tidak Langsung	3.210.536.202	3.139.864.028	-	97,79
2.	Belanja Langsung	2.860.000.000	2.812.728.850	100	98,35

Anggaran Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dipergunakan untuk membiayai Program rutin dan teknis sebanyak 12 program dan 31 kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.2

Anggaran dan Realisasi Program Rutin dan Teknis Tahun 2020

No.	Nama Program / Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan	%		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	483.255.330	482.150.513	99,77	1.104.817	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	100	-	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	200.082.400,00	199.190.863,00	99,55	891.537,00	
3	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	100	-	
4	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	141.117.630,00	140.994.800,00	99,91	122.830,00	
5	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	115.055.300,00	114.964.850,00	99,92	90.450,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	288.411.270,00	288.411.270,00	100	-	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	45.350.000,00	45.350.000,00	100	-	
2	Pengadaan Mebeleur	36.000.000,00	36.000.000,00	100	-	
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	61.101.270,00	61.101.270,00	100	-	
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	110.500.000,00	110.500.000,00	100	-	
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.460.000,00	15.460.000,00	100	-	
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100	-	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.000.000,00	17.000.000,00	100	-	
1	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya	17.000.000,00	17.000.000,00	100	-	
IV	Program Penunjang Pemerintahan Umum	69.710.900,00	69.710.900,00	100	-	
1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	69.710.900,00	69.710.900,00	100	-	

No.	Nama Program / Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan	%		
V	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	153.040.000,00	153.040.000,00	100	-	
1	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	22.720.000,00	22.720.000,00	100	-	
2	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	100	-	
3	Rapat Koordinasi Pendamping Desa	106.320.000,00	106.320.000,00	100	-	
VI	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	690.450.000,00	690.450.000,00	100	-	
1	Pembinaan Asosiasi BUMDES Kab. Bone	147.250.000,00	147.250.000,00	100	-	
2	Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal BUMDES	543.200.000,00	543.200.000,00	100	-	
VII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	59.424.000,00	59.424.000,00	100	-	
1	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	39.600.000,00	39.600.000,00	100	-	
2	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	19.824.000,00	19.824.000,00	100	-	
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	252.670.000,00	252.670.000,00	100	-	
1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	229.670.000,00	229.670.000,00	100	-	
2	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama	23.000.000,00	23.000.000,00	100	-	
IX	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	404.260.000,00	358.260.000,00	88,62	46.000.000,00	
1	Sarasehan Penguatan TP.PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	106.620.000,00	60.620.000,00	56,86	46.000.000,00	
2	Pelatihan Kader Posyandu Di Desa	50.360.000,00	50.360.000,00	100	-	
3	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan untuk Turut Serta dalam Pembangunan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100	-	
4	Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa	147.280.000,00	147.280.000,00	100	-	
X	Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	348.228.500,00	348.062.167,00	99,95	166.333,00	
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	184.718.500,00	184.608.300,00	99,94	110.200,00	
2	Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tingkat Kecamatan	33.570.000,00	33.570.000,00	100	-	
3	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	129.940.000,00	129.883.867,00	99,96	-	
XI	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat	56.180.000,00	56.180.000,00	100	-	
1	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	56.180.000,00	56.180.000,00	100	-	

No.	Nama Program / Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan	%		
XII	Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan	37.370.000,00	37.370.000,00	100	-	
1	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	37.370.000,00	37.370.000,00	100	-	
J U M L A H		2.860.000.000,00	2.812.728.850,00	98,35	47.271.150,00	

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Resntra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

NO	Kode	SASARAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
						I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
						7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x 100 %	14 = 6 + 12														15 = 14 /5 x 100%
1	2		3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	17			
	1	22		Urusan Wajib Pembedayaan Masyarakat dan Desa																							
1.	1	22	01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100	483.255.330				63.595.800	0	138.875.863	642	482.150.513	438	499	1486	1.143.434.393	175	164	DINAS PMD KAB. BONE				
a.	1	22	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpn (Rekening)	48	15.000.000	38	5.750.000	-	8	5.000.000		4.250.000	46,00	15.000.000	95,83	100,00	94,00	33.000.000	39,17	33,67				
	1	22	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	576	200.082.400			230	79.000.000	135	46.500.000	0	73.690.863	365,00	199.190.863	63,37	99,55	917,00	359.477.263	33,22	37,44			
	1	22	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	84	12.000.000			-	84	10.000.000		-	0	2.000.000	84,00	12.000.000	100,00	100,00	168,00	24.000.000	26,42	28,24		
	1	22	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yg diikuti (kegiatan)	100	141.117.630	48	67.144.000	51	71.380.000		2.470.800	0	-	99,00	140.994.800	99,00	99,91	199,00	440.942.280	39,80	29,40			
	1	22	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Administrasi Perkantoran (Paket)	60	115.055.300	13	15.164.300	27	31.240.550	8	9.625.000		58.935.000	48,00	114.964.850	80,00	99,92	108,00	286.014.850	36,00	34,98			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		87,64	99,88			35	33					
															Predikat Kinerja		TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
1	1	22	02	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	288.411.270	4	72.000.000	4	43.876.270	7	47.460.000	2	43725000	17,00	288.411.270	17,00	100,00	47,00	731.608.380	221,3333	307,20609	DINAS PMD KAB. BO NE		
b	1	22	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	-	0,00	0,00	7,00	84.350.000	20,00	19,88				
	1	22	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Paket)	7	45.350.000	7	38.350.000	0	7.000.000	0	-	-	7,00	45.350.000	100,00	100,00	14,00	86.350.000	40,00	23,59				
	1	22	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	7	36.000.000			7	36.000.000			-	7,00	36.000.000	100,00	100,00	14,00	157.500.000	40,00	48,91				
	1	22	02	22	Peneliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yg Terpelihara (Unit)	1	61.101.270	1	20.000.000		3.376.270		-	37.725.000	1,00	61.101.270	100,00	100,00	2,00	68.141.970	40,00	212,81				
	1	22	02	24	Peneliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasioanal yg Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal yg Terpelihara	24	110.500.000	2	50.000.000	2	32.500.000	2	23.000.000	2	5.000.000	8,00	110.500.000	33,33	100,00	32,00	255.435.910	21,33	36,57			

	1	22	02	26		Pemeliharaan Rutin/berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihata	4	15.460.000		1	5.000.000	3	10.460.000		-	4,00	15.460.000	100,00	100,00	8,00	35.460.000	40,00	34,07			
	1	22	02	28		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihata	4	20.000.000	1,00	2.000.000	1,00	3.000.000	2	14.000.000		1.000.000	4,00	20.000.000	100,00	100,00	4,00	20.000.000	20,00	19,22		
	1	22	02	45		Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihata		-		-		-		-		0,00	-	0,00	0,00	1,00	24.370.500	100,00	4,54			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		66,67	75,00			40,17	49,95				
Predikat Kinerja																		SEDANG	SEDANG			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
3.	1	22	03		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	17.000.000	0	-	30	17.000.000	0	-	0	-	30	17.000.000	100,00	100,00	30	17.000.000	25,00	10,63	DINAS PMD KAB. BONE	
	1	22	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	30	17.000.000		30	17.000.000		-		-	30	17.000.000	100,00	100,00	30	17.000.000	25,00	10,63			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	100,00			25,00	10,63				
Predikat Kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
3.	1	22	08		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Program Penunjang Pemerintahan Umum		7	69.710.900	2	24.060.000	2	44.650.000	2	1.000.900	0	-	6	69.710.900	100	#DIV/0!	12	180.698.300	44,44444	36,533491	DINAS PMD KAB. BONE	
	1	22	08	01		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia	6	69.710.900	2	24.060.000	2	44.650.000	2	1.000.900		-	6	69.710.900	100,00	100,00	12	180.698.300	44,44	36,53		
	1	22	08	02		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Website Perangkat Daerah	1		0	-			0	-		-	0	-	#DIV/0!	0	-	0,00	0,00			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	100,00			44,44	36,53				
Predikat Kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
4.	1	22	15		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan n desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		73	153.040.000	2	29.920.000	11	20.000.000	30	37.720.000	4	65.400.000	47	153.040.000	64,38	100,00	95,00	618.707.678	126,67	17,92	DINAS PMD KAB. BONE	
	1	22	15	16		Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pedesaan dalam Penerapan TTG (Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelompok dalam Penerapan TTG (Kegiatan)	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0,00	-	-	1	187.340.000	20,00	18,73			
	1	22	15	30		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Masyakat Desa yang dibina (lembaga)	40	22.720.000		10	10.000.000	30	12.720.000	0		40,00	22.720.000	100,00	100,00	80	75.720.000	24,39	16,72			
	1	22	15	42		Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Desa	1	24.000.000		1	10.000.000		14.000.000		1,00	24.000.000	100,00	100,00	2	96.660.000	40,00	9,67				

	1	22	15	43		Rapat Koordinasi Pendamping Desa	Jumlah Pelaksanaan Rakor Pendampingan (Kali)	6	106.320.000	2	29.920.000				11.000.000	4	65.400.000	6,00	106.320.000	100,00	100,00	12	258.987.678	40,00	25,90		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	100,00			40,00	25,90			
Predikat Kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
5.	1	08	16		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan lembaga Ekonomi Masyarakat	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	90	690.450.000	0	60.259.900	2	330.450.000	0	99.290.100	0	200.450.000	2	690.450.000	2,22	100,00	4,00	1.303.100.000	4,12	25,30	DINAS PMD KAB. BONE	
	1	08	16	36		Pembinaan, Evaluasi dan Publikasi Potensi Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Publikasi Potensi Kawasan Perdesaan (Kegiatan)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	1	196.000.000	20,00	14,00		
	1	08	16	41		Pembinaan Asosiasi BUMDES Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Pembinaan Asosiasi Bumdes (kegiatan)	1	147.250.000			1	146.800.000				450.000	1,00	147.250.000	100,00	100,00	1	147.250.000	20,00	11,78		
	1	08	16	43		Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal Bumdes	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal (kegiatan)	1	543.200.000		60.259.900	1	183.650.000		99.290.100		200.000.000	1,00	543.200.000	100,00	100,00	2	959.850.000	40,00	38,39		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			66,67	66,67			26,67	21,39			
Predikat Kinerja																			SEDANG	SEDANG			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
6.	1	08	17		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	72	59.424.000		7.250.000		12.750.000	3	16.600.000		22.824.000	3,00	59.424.000	4,17	100,00	3,00	848.823.500	4,00	9,03	DINAS PMD KAB. BONE		
	1	08	17	04		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Profil Desa)	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Kelurahan	1	39.600.000		7.250.000	1	12.750.000		6.600.000		13.000.000	1,00	39.600.000	100,00	100,00	2	137.010.000	40,00	15,22		
	1	08	17	13		Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa terpilih	0	-		-		0		0		0,00	-	-	0,00	10	414.027.350	3,05	5,60			
	1	08	17	14		Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Jumlah PAW	8	19.824.000		-		0	3	10.000.000	5	9.824.000	8,00	19.824.000	100,00	100,00	18	297.786.150	64,29	27,05		
	1	08	17	13		Pengkuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah BPD yang dikukuhkan	1622	-		-		0		0		0,00	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00			

1	08	17	17		Pembinaan, Monitoring dan evaluasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi LPMD dari seluruh LPM yang aktif (Lembaga)	0	-	-	0	0	0,00	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)														66,67	66,67			35,78	15,96					
Predikat Kinerja														SEDANG	SEDANG			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
6.	1	08	18		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	60	252.670.000	-	203.370.000	0	40.400.000	8.900.000	0,00	252.670.000	0,00	100,00	0,00	408.950.000	0,00	28,50	DINAS PMD KAB. BONE		
	1	08	18	02		Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa (Kegiatan)	1	229.670.000	1	180.370.000	40.400.000	8.900.000	1,00	229.670.000	100,00	100,00	1	229.670.000	25,00	19,14			
	1	08	18	13		Pelatihan Awal Masa Jabatan	Jumlah Kepala Desa yang dilatih (orang)	0	-				0,00	-	-	0,00	15	53.340.000	4,46	11,99				
	1	08	18	20		Monitoring dan evaluasi kerjasama desa	Jumlah Kegiatan monitoring dan di evaluasi dari BKAD aktif (Kegiatan)	1	23.000.000	0	1	23.000.000		1,00	23.000.000	100,00	100,00	2	92.940.000	40,00	18,59			
	1	08	18	23		Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun RPJMD Desa	Jumlah Tim Penyusun RPJM Desa yang ditingkatkan	0	-	-			0,00	-	-	0,00	20	33.000.000	5,92	6,73				
Rata-rata capaian kinerja (%)														33,33	33,33			16,79	12,44					
Predikat Kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
7.	1	08	19		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	100	404.260.000	0	10.100.000	0	137.180.000	0	-	210.980.000	44,00	358.260.000	44,00	88,62	46	1.105.260.000	20	20	DINAS PMD KAB. BONE
	1	08	19	05		Peningkatan Kapasitas Kelompok Industri Rumah Tangga	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan (orang)	42					0,00	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00				

1	08	19	09		Sarasehan Penguatan TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan & Kabupaten	Jumlah Kegiatan Sarasehan Penguatan TP PKK	1	106.620.000	0	-	0	-	0	-	1	60.620.000	1,00	60.620.000	100,00	56,86	1	60.620.000	20,00	6,06		
1	08	19	14		Pelatihan Kader Posyandu di Desa	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	1	50.360.000							1	50.360.000	1,00	50.360.000	100,00	100,00	2	250.360.000	40,00	25,04		
1	08	19	15		Pelatihan MC bagi Kader PKK	Jumlah Peserta Perempuan yang mengikuti bimtek	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	-	0,00	0	-	0,00	0,00		
1	08	19	16		Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan untuk turut serta dalam pembangunan desa	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan pembinaan kelompok perempuan (Kegiatan)	2	100.000.000							2	100.000.000	2,00	100.000.000	100,00	100,00	3	300.000.000	60,00	30,00		
1	08	19	19		Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa	Jumlah Peserta Perempuan yang mengikuti bimtek	48	147.280.000		10.100.000	40	137.180.000					40,00	147.280.000	83,33	100,00	80	294.280.000	4,88	31,07		
1	08	19	21		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan pada Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang diikuti	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0,00	-	-	0,00	2	200.000.000	20,00	20,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			61,11	66,67			20,00	20,00		
Predikat Kinerja																			RENDAH	SEDANG			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
8	1	08	22		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset desa	70	348.228.500	0	14.800.000	0	21.700.000	0	62.994.999	1	248.567.168	1	348.062.167	1,43	99,95	1,00	773.352.667	1,33	96,74	DINAS PMD KAB. BONE	
1	08	22	06		Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan keuangan dan aset desa (Kegiatan)	1	184.718.500		8.450.000		21.700.000		56.000.000	1	98.458.300	1,00	184.608.300	100,00	99,94	2	360.058.300	40,00	32,57		
1	08	22	07		Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tk. Kecamatan	Jumlah Aparat yang terlatih dalam verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tk. Kecamatan	1	33.570.000							1	33.570.000	1,00	33.570.000	100,00	100,00	2	209.020.000	40,00	18,91		
1	08	22	08		Pembinaan Administrasi pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	1	129.940.000		6.350.000		-		6.994.999	1	116.538.868	1,00	129.883.867	100,00	99,96	2	204.274.367	40,00	25,55		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	99,96			40,00	25,55		
Predikat Kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

9	1	22	23	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat		85	56.180.000	1	45.480.000	0	10.700.000	0	-	0	1	56.180.000	100	100	2	204.570.000	40	49,895122	DINAS PMD KAB. BONE		
	1	22	23	03	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan kapasitasnya KPMD (Kegiatan)	1	56.180.000	1	45.480.000		10.700.000		0	0	1,00	56.180.000	100	100	2	204.570.000	40,00	49,90			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100			40	50			
Predikat Kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
9	1	22	25	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan		1	37.370.000	0	5.480.000	1	21.890.000	0	10.000.000	0	-	1	37.370.000	100	100	2	454.020.000	40,00	23,65	DINAS PMD KAB. BONE	
	1	22	25	03	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen evaluasi lomba desa dan kelurahan	1	37.370.000	0	5.480.000	1	21.890.000		10.000.000		1,00	37.370.000	100	100	2	454.020.000	40,00	23,65			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100			40	24			
Predikat Kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								2.860.000.000		269.349.900		863.566.270		379.061.799		939.722.031		2.812.728.850								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 11)																		78,21	80,82			33,88	29,04			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 11)																		TINGGI	TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, dapat dilihat dari Struktur Organisasi yang terdiri atas 4 Bidang dan 1 Sekretariat yang terdiri atas : Bidang Bina PemerintahanDesa, Bidang Bina Peremcanaan, Pengembangan Kerjasama Evaluasi Desa, Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa, Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, dan Sekretariat.

Adapun Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa, serta unsur lain yang ada di Desa.

Secara lengkap kinerja pelayanan Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Kepala Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bone
Tahun 2020

No.	Kecamatan	JumlahKadesMenurutJenisKelamin		Total
		L	P	
1	AJANGALE	10	2	12
2	AMALI	8	6	14
3	AWANGPONE	10	7	17
4	BAREBBO	10	7	17
5	BENGO	9	0	9
6	BONTOCANI	9	1	10
7	CENRANA	14	1	15
8	CINA	9	2	11
9	DUA BOCCOE	18	3	21
10	KAHU	16	3	19
11	KAJUARA	16	1	17
12	LAMURU	9	2	11
13	LAPPARIAJA	8	1	9
14	LIBURENG	17	1	18
15	MARE	16	1	17
16	PALAKKA	12	3	15
17	PATIMPENG	8	2	10
18	PONRE	8	1	9
19	SALOMEKKO	6	1	7
20	SIBULUE	16	3	19
21	TELLU LIMPOE	10	1	11
22	TELLU SIATTINGE	9	6	15
23	TONRA	11	0	11
24	ULAWENG	9	5	14
	JUMLAH	268	60	328

Tabel 2.5
Jumlah Perangkat Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bone
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Perangkat Desa Menurut Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	AJANGALE	64	35	99
2	AMALI	81	30	111
3	AWANGPONE	101	53	154
4	BAREBBO	80	51	131
5	BENGO	60	14	74
6	BONTOCANI	67	22	89
7	CENRANA	82	47	129
8	CINA	65	35	100
9	DUA BOCCOE	118	52	170
10	KAHU	144	25	169
11	KAJUARA	99	45	144
12	LAMURU	71	19	90
13	LAPPARIAJA	73	7	80
14	LIBURENG	125	39	164
15	MARE	108	30	138
16	PALAKKA	67	65	132
17	PATIMPENG	70	22	92
18	PONRE	65	30	95
19	SALOMEKKO	43	15	58
20	SIBULUE	111	63	174
21	TELLU LIMPOE	60	23	83
22	TELLU SIATTINGE	96	49	145
23	TONRA	70	26	96
24	ULAWENG	85	44	129
	JUMLAH	2005	841	2846

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	9	13
1	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	-	93%	93%	
2	Persentase Desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa			70%	100%	
3	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik			92%	92%	
4	Persentase LPM Aktif			100%	100%	
5	Persentase LPM Berprestasi			0,80%	0,80%	
6	Persentase Lembaga Adat Aktif			60%	60%	
7	Persentase PKK Aktif			100%	100%	
8	Rata-rata JumlahKelompokBinaan PKK			100%	100%	
9	PersentasePosyanduAktif			100%	100%	
10	PersentasePeningkatanJumlahBumdesAktif			100%	100%	
11	PersentaseDesa yang Menerapkan TTG			100%	100%	

Melihat tabel diatas mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone diatas rata-rata indikator yang ada sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah mencapai target yang telah ditentukan diantaranya yaitu : Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi capaian sebesar 93%, Persentase Desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 telah dicapai sebesar 70% sama dengan target yang telah ditentukan, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik telah mencapai 92%, Persentase LPM aktif telah mencapai 100%, dan diantara LPM yang aktif sebanyak 0,80% telah menunjukkan sebagai LPM berprestasi, Persentase Lembaga Adat Aktif sebanyak 60% lembaga, Persentase PKK Aktif sebanyak 100% yang menunjukkan bahwa semua PKK yang ada di desa berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana terdapat rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK masing-masing terdapat 1 binaan per desa, Capaian Persentase Posyandu Aktif sebesar 100% yang menunjukkan bahwa setiap posyandu yang ada di desa memberikan layanan yang berkesinambungan kepada masyarakat, Capaian Persentase Peningkatan Jumlah Bumdes Aktif sebesar 100% dari 327 bumdes di Kab. Bone, dan Persentase Desa yang Menerapkan TTG telah mencapai 100%.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DPMD dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan beberapa fungsinya. Diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan menjalankan tugas dan fungsinya tersebut DPMD menghadapi beberapa pula permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weakness) apabila tidak ditangani segera secara intensif. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMD , adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya peningkatan status desa;
2. Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan;

3. Tidak berfungsinya secara optimal unit usaha di wilayah pedesaan;
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
5. Kurang profesionalnya pengelolaan sistem pemerintahan desa;
6. Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa;
7. Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;
8. Belum akuntabel, trnsparan dan partisipatifnya pengelolaan keuangan desa.

Keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah berdasarkan identifikasi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Telaah Visi dan Misi Bupati Terpilih

No	Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Mengoptimalkan akses pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan.	Kurang optimalnya peningkatan status desa	Minimnya dukungan OPD terkait dalam peningkatan status desa	Dukungan Pendamping profesional dalam peningkatan status desa
		Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Kurangnya jumlah aparatur DPMD dalam pembinaan pengembangan kemandirian ekonomi	Dukungan pengembangan kemandirian melalui peran Pendamping Profesional pada kegiatan pemberdayaan
		Tidak berfungsinya secara optimal unit usaha di wilayah pedesaan	Besaran Jumlah Desa yang ada di Kabupaten bone yang cukup besar yang tidak sejalan dengan anggaran yang tersedia untuk melakukan pembinaan	Terbukanya peluang lapangan kerja dalam peningkatan Pendapatan Asli desa
		Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam	Tingginya ketrgantungan	Dukungan pendamping profesional dalam

No	Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		membangun desa	masyarakat terhadap pemerintah	mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		Kurang profesionalnya pengelolaan sistem pemerintahan desa	Besaran Jumlah Desa yang ada di Kabupaten bone yang cukup besar yang tidak sejalan dengan anggaran yang tersedia untuk melakukan pembinaan	Upaya penguatan peningkatan kapasitas aparat desa
		Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa	Tradisi, sikap dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik serta masih kuatnya budaya patriarki d desa	Kemajuan teknologi informasi untuk mendorong partisipasi perempuan
		Rendahnya SDM pengelola keuangan desa	Besaran Jumlah Desa yang ada di Kabupaten bone yang cukup besar yang tidak sejalan dengan anggaran yang tersedia untuk melakukan pembinaan	Upaya penguatan peningkatan kapasitas Pengelola keuangan desa
		Belum akuntabel transparan dan partisipatifnya pengelolaan keuangan desa	Besaran Jumlah Desa yang ada di Kabupaten bone yang cukup besar yang tidak sejalan	Upaya penguatan peningkatan kapasitas aparat desa

No	Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			dengan anggaran yang tersedia untuk melakukan pembinaan	

1. Tantangan

Dalam melakukan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menghadapi beberapa tantangan yang harus bisa di atasi, adapun tantangan itu antara lain:

- a. Masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat.
- b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan apratur pemerintahan desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Kurangnya pemahaman atas pentingnya kerjasama desa.
- d. Minimnya fasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam kerjasama desa.
- e. Lembaga kerjasama desa dalam hal ini Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- f. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal sebagai efek dari kuatnya dinamika pembangunan
- g. Peranan organisasi non pemerintah yang melakukan pembinaan selama ini tidak teridentifikasi, cenderung melakukan pembinaan tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- h. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- i. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,
- j. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,
- k. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
- l. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.

- m. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

2. Peluang

Selain tantangan, terdapat juga peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pembangunan, peluang itu antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat
- b. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PDT dan Transmigrasi serta Kementerian/Lembaga Non Kementerian lainnya sebagai tindak lanjut dari program NAWA CITA Presiden yang diarahkan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pendanaan Dana Desa dari APBN.
- c. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- d. Tersedianya tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa di desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa masih kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

2. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa.

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju

bersama sehingga dapat mengurangi kesejangan antar wilayah.

3. Menurunnya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal.

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : tolong menolong, gotong royong, tudang sipulung dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

4. Masih Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Belum Optimalnya Lembaga ekonomi Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan perekonomian desa melalui Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

6. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan

pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

7. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Dalam membangun good governance bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan. Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolakukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2022 rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Persentase Rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100%	9.531.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Persentase Rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100%	9.531.500.000
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%	174.633.800	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%	174.633.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (213.01.201.01)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	62.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (213.01.201.01)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	62.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (213.01.201.06)	Kab. Bone	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	72.633.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (213.01.201.06)	Kab. Bone	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	72.633.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201.07)	Kab. Bone	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201.07)	Kab. Bone	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	40.000.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (213.01.202)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan periodik perangkat daerah secara tepat waktu</i>	100 %	<i>4.140.000.000</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (213.01.202)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan periodik perangkat daerah secara tepat waktu</i>	100 %	<i>4.140.000.000</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (213.01.202.01)	Kab. Bone	Jumlah Pembayaran gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN (kali)	490 Orang	4.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (213.01.202.01)	Kab. Bone	Jumlah Pembayaran gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN (kali)	490 Orang	4.000.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (213.01.202.03).	Kab. Bone	Jumlah Laporan Penatausahaan SKPD	12 Dokumen	100.000.000	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (213.01.202.03).	Kab. Bone	Jumlah Laporan Penatausahaan SKPD	12 Dokumen	100.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (213.01.202.07)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (213.01.202.07)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	40.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (213.01.203)	Kab. Bone	Persentase jumlah periodik iktisar hasil pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	40.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (213.01.203)	Kab. Bone	Persentase jumlah periodik iktisar hasil pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	40.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (213.01.203.01)	Kab. Bone	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (213.01.203.01)	Kab. Bone	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	25.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (213.01.203.06)	Kab. Bone	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	2 Laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (213.01.203.06)	Kab. Bone	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	2 Laporan	15.000.000
	Aministrasi Kepegawaian Perangkat daerah (213.01.205)	Kab. Bone	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	355.000.000	Aministrasi Kepegawaian Perangkat daerah (213.01.205)	Kab. Bone	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	355.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (213.01.205.02)	Kab. Bone	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	35 Pasang	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (213.01.205.02)	Kab. Bone	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	35 Pasang	35.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (213.01.205.03)	Kab. Bone	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (213.01.205.03)	Kab. Bone	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (213.01.205.09)	Kab. Bone	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (213.01.205.09)	Kab. Bone	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	120.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (213.01.205.11)	Kab. Bone	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek	20 Orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (213.01.205.11)	Kab. Bone	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek	20 Orang	150.000.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah (213.01.206)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>764.883.550</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah (213.01.206)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>764.883.550</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (213.01.206.02)	Kab. Bone	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor penunjang administrasi perkantoran	12 Paket	52.667.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (213.01.206.02)	Kab. Bone	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor penunjang administrasi perkantoran	12 Paket	52.667.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (213.01.206.04)	Kab. Bone	Jumlah Bahan Paket Logistik Yang Tersedia	12 Paket	90.215.850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (213.01.206.04)	Kab. Bone	Jumlah Bahan Paket Logistik Yang Tersedia	12 Paket	90.215.850
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (213.01.206.05)	Kab. Bone	Jumlah Paket Penyediaan Barang cetakan & Penggandaan yang tersedia	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (213.01.206.05)	Kab. Bone	Jumlah Paket Penyediaan Barang cetakan & Penggandaan yang tersedia	12 Paket	50.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (213.01.206.06)	Kab. Bone	Jumlah Media yang dibayarkan	180 Kali	32.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (213.01.206.06)	Kab. Bone	Jumlah Media yang dibayarkan	180 Kali	32.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Material (213.01.206.07)	Kab. Bone	Jumlah paket bahan/ material yang tersedia	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Material (213.01.206.07)	Kab. Bone	Jumlah paket bahan/ material yang tersedia	1 Paket	40.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (213.01.206.08)	Kab. Bone	Jumlah tamu yang terfasilitasi	625 Orang	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (213.01.206.08)	Kab. Bone	Jumlah tamu yang terfasilitasi	625 Orang	25.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (213.01.206.09)	Kab. Bone	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	200 Kegiatan	475.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (213.01.206.09)	Kab. Bone	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	200 Kegiatan	475.000.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.207)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pengadaan Paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>1.340.000.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.207)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pengadaan Paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>1.340.000.000</i>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan (213.01.207.01)	Kab. Bone	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan (213.01.207.01)	Kab. Bone	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit	500.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (213.01.207.02)	Kab. Bone	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (213.01.207.02)	Kab. Bone	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	300.000.000
	Pengadaan Mebel (213.01.207.05)	Kab. Bone	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Paket	80.000.000	Pengadaan Mebel (213.01.207.05)	Kab. Bone	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Paket	80.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.207.06)	Kab. Bone	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	3 Paket	380.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.207.06)	Kab. Bone	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	3 Paket	380.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Bone	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Paket	80.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bone	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Paket	80.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	atau Bangunan Lainnya (213.01.207.10)					(213.01.207.10)				
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.208)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>563.235.600</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.208)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>563.235.600</i>
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik (213.01.208.02)	Kab. Bone	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, internet dan Tv)	36 Rekening	25.000.000	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik (213.01.208.02)	Kab. Bone	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, internet dan Tv)	36 Rekening	25.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (213.02.208.03)	Kab. Bone	Jumlah paket pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	35.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (213.02.208.03)	Kab. Bone	Jumlah paket pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	35.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (213.01.208.04)	Kab. Bone	Jumlah paket pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 Paket	503.235.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (213.01.208.04)	Kab. Bone	Jumlah paket pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 Paket	503.235.600
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.209)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>2.153.747.050</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.209)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>2.153.747.050</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (213.01.209.01)	Kab. Bone	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala	3 Paket	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (213.01.209.01)	Kab. Bone	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala	3 Paket	200.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (213.01.209.02)	Kab. Bone	Jumlah paket pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan rutin/berkala gedung kantor	3 Paket	64.665.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (213.01.209.02)	Kab. Bone	Jumlah paket pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan rutin/berkala gedung kantor	3 Paket	64.665.000
	Pemeliharaan Mebel (213.01.209.05)	Kab. Bone	Jumlah paket mebel yang terpelihara	4 Paket	15.000.000	Pemeliharaan Mebel (213.01.209.05)	Kab. Bone	Jumlah paket mebel yang terpelihara	4 Paket	15.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.209.06)	Kab. Bone	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Mesin yang Terpelihara	4 Paket	27.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.209.06)	Kab. Bone	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Mesin yang Terpelihara	4 Paket	27.500.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (213.01.209.08)	Kab. Bone	Jumlah paket aset tak berwujud yang terpelihara	1 Paket	100.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (213.01.209.08)	Kab. Bone	Jumlah paket aset tak berwujud yang terpelihara	1 Paket	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (213.01.209.09)	Kab. Bone	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	1 Unit	1.719.582.050	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (213.01.209.09)	Kab. Bone	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	1 Unit	1.719.582.050
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (213.01.209.10)	Kab. Bone	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara/ direhabilitasi	1 Paket	27.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (213.01.209.10)	Kab. Bone	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara/ direhabilitasi	1 Paket	27.000.000
	Program Peningkatan Kerjasama Desa (213.03)	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100%	187.729.900	Program Peningkatan Kerjasama Desa (213.03)	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100%	187.729.900
	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (213.03.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase pelaksanaan Kerjasama antar Desa</i>	<i>100%</i>	<i>187.729.900</i>	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (213.03.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase pelaksanaan Kerjasama antar Desa</i>	<i>100%</i>	<i>187.729.900</i>

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (213.03.201.01)	Kab. Bone	Jumlah dokumen fasilitasi desa yang melakukan kerja sama antar desa	5 Dokumen	58.362.100	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (213.03.201.01)	Kab. Bone	Jumlah dokumen fasilitasi desa yang melakukan kerja sama antar desa	5 Dokumen	58.362.100
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (213.03.201.03)	Kab. Bone	Jumlah laporan pembangunan perdesaan yang terfasilitasi	5 Desa	129.367.800	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (213.03.201.03)	Kab. Bone	Jumlah laporan pembangunan perdesaan yang terfasilitasi	5 Desa	129.367.800
	Program Administrasi Pemerintahan Desa (213.04)	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	79%	10.061.731.230	Program Administrasi Pemerintahan Desa (213.04)	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	79%	10.061.731.230
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	79%	10.061.731.230	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	79%	10.061.731.230
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201.01)	Kab. Bone	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	328 Laporan	39.750.100	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201.01)	Kab. Bone	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	328 Laporan	39.750.100
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (213.04.201.03)	Kab. Bone	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	141 Desa	126.382.530	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (213.04.201.03)	Kab. Bone	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	141 Desa	126.382.530
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (213.04.201.04)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan desa	984 Desa	141.482.760	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (213.04.201.04)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan desa	984 Desa	141.482.760

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (213.04.201.05)	Kab. Bone	Jumlah orang yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi sebagai aparatur pemerintah desa	469 Desa	138.251.160	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (213.04.201.05)	Kab. Bone	Jumlah orang yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi sebagai aparatur pemerintah desa	469 Desa	138.251.160
	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (213.04.201.08)	Kab. Bone	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	324 Bumdes	220.093.850	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (213.04.201.08)	Kab. Bone	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	324 Bumdes	220.093.850
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (213.04.201.09)	Kab. Bone	Jumlah Kepala Desa yang terpilih, diangkat dan diberhentikan	141 Orang	9.000.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (213.04.201.09)	Kab. Bone	Jumlah Kepala Desa yang terpilih, diangkat dan diberhentikan	141 Orang	9.000.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (213.04.201.11)	Kab. Bone	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	1 Dokumen	47.560.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (213.04.201.11)	Kab. Bone	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	1 Dokumen	47.560.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (213.04.201.13)	Kab. Bone	Jumlah laporan aset desa yang tersusun	328 Desa	130.515.700	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (213.04.201.13)	Kab. Bone	Jumlah laporan aset desa yang tersusun	328 Desa	130.515.700
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (213.04.201.18)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa	3 Dokumen	217.695.130	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (213.04.201.18)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa	3 Dokumen	217.695.130
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (213.05)	Kab. Bone	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100%	1.385.534.710	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (213.05)	Kab. Bone	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100%	1.385.534.710

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota (213.05.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan</i>	<i>100%</i>	<i>1.385.534.710</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota (213.05.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan</i>	<i>100%</i>	<i>1.385.534.710</i>
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.02)	Kab. Bone	Jumlah laporan fasilitasi dalam penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan	1 Laporan	34.996.610	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.02)	Kab. Bone	Jumlah laporan fasilitasi dalam penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan	1 Laporan	34.996.610
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(R	Kab. Bone	Jumlah laporan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa	2 Laporan	750.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW, PKK,POSYANDU,LPM, dan Karang Taruna)	Kab. Bone	Jumlah laporan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa	2 Laporan	750.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	T,RW,PKK,POSY ANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.03)					Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.03)				
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (213.05.201.03)	Kab. Bone	Jumlah laporan fasilitasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Desa	100.538.100	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (213.05.201.03)	Kab. Bone	Jumlah laporan fasilitasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Desa	100.538.100
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (213.05.201.09)	Kab. Bone	Jumlah laporan fasilitasi dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	3 Laporan	500.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (213.05.201.09)	Kab. Bone	Jumlah laporan fasilitasi dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	3 Laporan	500.000.000

2.5 **Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah kabuapten Bone juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.** Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsive terhadap permasalahan serta isu isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu/Stunting	Kab. Bone	Jumlah Kader yang dilatih	100 orang	
	Bimbingan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kab. Bone	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	328 Desa	
	Pelatihn Peningkatan Kapasitas BPD	Kab. Bone	Jumlah Anggota BPD yang dilatih	328 Desa	
	Pelatihan MC	Kab. Bone	Jumlah Orang yang dilatih	30 Orang	
	Pembinaan Lembaga Adat Desa	Kab. Bone	Jumlah Orang yag dilatih	30 Orang	
	Pembinaaan Kawasan Pedesaan	Kab. Bone	Jumlah kawasan pedesaan yang dibina	2 Desa	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PMD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara perangkat Daerah kabupaten dengan Kementerian/Lembaga dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi, Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPD RI), dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- a. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
- b. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
- c. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
- d. Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa.
- e. Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (Smart Village).

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah :

1. mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan, meliputi:
 - a. berkembangnya status pembangunan desa;
 - b. meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan menjadi 9,90 %.
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan meliputi:

- a. revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma);
 - b. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi;
- Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan adalah :
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
 3. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan penguasaan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
 5. Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kab. Bone Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi, yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang

berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan akses , pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desadankawasanperdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum ,dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi pada Kabupaten Bone ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung misi ke 4 (empat), yaitu **“Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan”**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, Tujuan Renstra DPMD adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa
2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa
3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Desa; dan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD.

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwaju dan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan.

Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, peningkatan usaha pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan adat dan social budaya. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desatahun 2022 terlampir pada table 3.1 tentang ***Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023*** berikut ini :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									9,858,646,200			14,428,500,000	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									4,800,487,650			9,863,500,000	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									116,543,700			165,000,000	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	6 Dokumen	100 %	43,909,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	70,000,000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian perangkat daerah yang tersusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Dokumen	100 %	72,633,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	45,000,000
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian perangkat daerah yang tersusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,108,646,200			4,444,000,000	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan perodikperangkat daerah secara tepat waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	35 Orang	100 %	3,108,646,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,300,000,000
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan SKPD	Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan perodikperangkat daerah secara tepat waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100,000,000
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan periodik perangkat daerah yang tersusun	Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan perodikperangkat daerah secara tepat waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	4 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	44,000,000
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									0			41,500,000	
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Persentase jumlah laporan periodik iktisar hasil pelaksanaan administrasi barang milik daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Persentase jumlah laporan periodik iktisar hasil pelaksanaan administrasi barang milik daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	16,500,000
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0			410,000,000			
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	35 Pasang	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	5 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	55,000,000
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 Orang	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	150,000,000
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	20 Orang	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	165,000,000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							651,692,850			800,500,000			
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	4 Paket	100 %	52,667,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan bahan logistik yang tersedia	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	7 Paket	100 %	90,215,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	90,000,000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan barang cetakan & penggandaan yang tersedia	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Paket	100 %	36,649,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah media yang tersedia	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	10 Media	100 %	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	33,000,000
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan/material yang tersedia	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	5 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	45,000,000
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	300 Orang	100 %	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	27,500,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	200 Kegiatan	100 %	426,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	500,000,000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								167,600,000			1,144,000,000		
2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	Persentase pengadaan paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	550,000,000
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase pengadaan paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	330,000,000
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor sesuai rencana kebutuhan	Persentase pengadaan paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	88,000,000
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase pengadaan paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 Paket	100 %	167,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	88,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	Persentase pengadaan paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	0
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase pengadaan paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	88,000,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							515,655,600				617,000,000		
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pembiayaan jasa komunikasi bulanan (telepon/faxmile, internet dan tv)	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 Paket	100 %	12,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	27,000,000
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	4 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 Paket	100 %	503,235,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	550,000,000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							240,349,300				2,241,500,000		
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan secara rutin/berkala	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Paket	100 %	112,569,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	220,000,000
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Paket	100 %	64,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	45,000,000
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket mebel yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	4 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	15,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan mesin yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 Paket	100 %	26,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	31,000,000
2	13	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket aset tak berwujud yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100,000,000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara/direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	1 Unit	100 %	36,364,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,800,000,000
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara/direhailitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	4 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA							0				55,000,000		
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa							0				55,000,000		
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang sarana dan prasarananya terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Desa	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100 Persen	55,000,000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							187,729,900				600,000,000		
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa							187,729,900				600,000,000		
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam melakukan kerja sama antar desa	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	30 Desa	100 %	58,362,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100 Persen	100,000,000
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	Jumlah kawasan perdesaan yang terfasilitasi	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	33 Desa	100 %	129,367,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100 Persen	500,000,000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							4,319,890,840				3,010,000,000		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							4,319,890,840				3,010,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah desa yang memperoleh pengetahuan tentang administrasi pemerintahan desa	Presentase Ketetapan Penyampaiann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	328 Desa	100 %	39,750,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	210,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	Presentase Ketetapan Penyampaiann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	177 Desa	100 %	126,382,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	400,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah desa yang memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa	Presentase Ketetapan Penyampaiann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	328 Desa	100 %	141,482,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	200,000,000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah desa yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi sebagai aparatur pemerintah desa	Presentase Ketetapan Penyampaiann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	328 Desa	100 %	138,251,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	200,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	Presentase Ketetapan Penyampaiann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	324 Bumdes	100 %	220,093,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	500,000,000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah kepala desa yang terpilih, diangkat dan diberhentikan	Presentase Ketetapan Penyampaiann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	141 Orang	100 %	3,258,159,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	500,000,000
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan	Presentase Ketetapan Penyampaiann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	10 Desa	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	100,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah desa yang telah melakukan pengimputan data ke dalam aplikasi Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)	Presentase Ketetapan Penyampaiann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	328 Desa	100 %	47,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah desa yang memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan aset desa	Presentase Ketetapan Penyampaiaann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	328 Desa	100 %	130,515,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	200,000,000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah desa yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi BPD	Presentase Ketetapan Penyampaiaann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	328 Desa	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	200,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa	Presentase Ketetapan Penyampaiaann Dokumen Adminitrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	79 Persen	3 Dokumen	100 %	217,695,130	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	79 Persen	400,000,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								550,537,810	900,000,000				
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								550,537,810	900,000,000				
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dalam penataan pembudayaan dan pendayagunaan lembaga	Cakupan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	1 Lembaga Adat	100 %	34,996,610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100 Persen	150,000,000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	Cakupan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 Lembaga	100 %	115,016,520	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100 Persen	250,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Cakupan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	328 Desa	100 %	100,538,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100 Persen	150,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Cakupan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	328 Desa	100 %	299,986,580	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100 Persen	350,000,000
TOTAL													9,858,646,200	14,428,500,000				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone merupakan program prioritas Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD PROV, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Program Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.699.009.085,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.543.700,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.909.900,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.633.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.007.167.745,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.007.167.745,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.692.740,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.667.700,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.215.740,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.649.300,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.660.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.600.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.600.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.655.600,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12.420.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.235.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.349.300,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.569.600,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.665.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.750.000,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.364.700,00
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	187.729.900,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	187.729.900,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	58.362.100,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	129.367.800,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.069.890.705,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.069.890.705,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	39.750.100,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	126.382.530,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	141.482.760,00

	Pembinaan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	138.251.160,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	220.093.850,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.008.159.475,00
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	47.560.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	130.515.700,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	217.695.130,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	550.537.810,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	550.537.810,00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	34.996.610,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	115.016.520,00
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.538.100,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	299.986.580,00

BAB V

PENUTUP

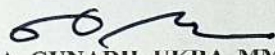
Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tahun 2022 yang berisiprioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Watampone, 29 Juli 2021

Kepala Dinas PMD Kab. Bone


Drs. A. GUNADIL UKRA, MM
Pangkat. Pembina Utama Muda
Nip. 19671006 199303 1 010